

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung perkembangan perekonomian Indonesia. Perkembangan yang dilakukan pemerintah adalah dengan membangun dan mengembangkan suatu usaha, yaitu Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Keberadaan UMKM mampu menciptakan peluang kerja bagi masyarakat, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Namun, kualitas UMKM tersebut belum optimal karena belum melakukan praktik pencatatan dan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pelaku UMKM mengenai pencatatan akuntansi sehingga hanya melakukan pencatatan sederhana terkait jumlah barang dagangan yang dibeli dan dijual, serta jumlah hutang dan piutang. Akan tetapi, pencatatan tersebut belum mencerminkan informasi keuangan yang valid, karena tidak mengacu pada standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Informasi keuangan yang disusun berdasarkan standar akuntansi memiliki manfaat bagi UMKM dan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis, seperti pembelian bahan baku, penetapan harga jual produk, pengajuan permohonan pembiayaan kepada pihak bank, pengembangan SDM (sumber daya manusia), serta evaluasi kondisi usaha yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, pelaku UMKM perlu memahami apa saja yang harus dipersiapkan dalam menerapkan sistem pencatatan akuntansi yang baik dan berkualitas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendukung pengembangan usaha.

Berdasarkan kondisi tersebut, Peraturan Menteri Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 pasal 3 menyatakan bahwa UMKM wajib menyelenggarakan dan menyusun laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas. Laporan keuangan disusun secara berkala sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan usaha. Oleh karena itu, untuk memudahkan pengaplikasian akuntansi dalam kegiatan usaha, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah (SAK EMKM) yang efektif diberlakukan sejak 1 Januari 2018. Kemudian pada tahun 2022, DSAK IAI mengesahkan perubahan nama SAK EMKM menjadi SAK Indonesia untuk EMKM dan berlaku efektif pada 1 Januari 2024. SAK EMKM lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dibandingkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Meskipun terlihat sederhana, namun SAK EMKM sudah memberikan informasi yang memadai dalam penyajian laporan keuangan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan usaha. Namun, masih banyak pelaku UMKM di Indonesia yang belum menerapkan praktik akuntansi dalam pencatatan keuangan usahanya. Padahal, penerapan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar yang berlaku dapat memberikan manfaat signifikan bagi pengelolaan dan pengembangan usaha UMKM.

Keterbatasan pengetahuan dan pemahaman mengenai akuntansi serta persepsi bahwa akuntansi merupakan hal yang rumit dan tidak terlalu penting bagi UMKM, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan minimnya penggunaan praktik akuntansi di kalangan pelaku UMKM. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi keuangan dan pemahaman

mengenai pentingnya penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAK menjadi sangat penting untuk mendorong adopsi praktik akuntansi yang lebih baik di kalangan UMKM di Indonesia. Namun, SAK EMKM masih belum banyak diterapkan oleh UMKM di Indonesia karena baru dikeluarkan oleh IAI secara khusus untuk entitas mikro kecil dan menengah, sehingga belum banyak pelaku UMKM yang mengetahuinya.

Sebagaimana halnya dengan salah satu UMKM yang ada di kota Medan, yaitu UMKM Tahu X. Usaha ini bergerak dibidang manufaktur yaitu pengolahan dan penjualan produk tahu. Produk yang dihasilkan terdiri dari dua jenis, yaitu tahu asli/putih dan tahu goreng/kuning. Usaha ini termasuk ke golongan entitas dengan kategori kecil yang memiliki omset penjualan per bulannya sebesar Rp1.000.000.000 dan memiliki kurang lebih 30 karyawan (berdasarkan informasi dari pemilik usaha). Omset yang dihasilkan oleh usaha ini masih tergolong kecil. Oleh karena itu, usaha ini perlu untuk melakukan penyusunan laporan keuangan yang terstruktur. Namun, pemilik usaha Tahu Mas Ponimin masih belum melakukan penyusunan laporan keuangan dan belum menerapkan SAK EMKM karena kurangnya pemahaman terhadap penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang terkait. Selama ini pemilik usaha hanya melakukan pencatatan atas penjualan dan pengeluaran saja. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul desain penyusunan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Tahu X.¹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang penulis kemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mendesain laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Tahu?

1.3. Tujuan Tugas Akhir

Berdasarkan rumusan masalah diatas terdapat tujuan penelitian ini adalah untuk mendesain laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM pada UMKM Tahu.

1.4. Kontribusi / Manfaat Tugas Akhir

Adapun kontribusi/manfaat dari penelitian ini, yaitu:

1. Sebagai dasar/acuan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar SAK EMKM.
2. Memberikan pemahaman pengelolaan laporan keuangan dalam mengelola bisnis, dan memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan.
3. Menjadi pertinggal informasi bisnis yang dapat digunakan untuk pengelolaan UMKM Tahu.

¹ Nama UMKM tidak ditampilkan disebabkan oleh objek penelitian tidak bersedia nama UMKM dipublikasikan.